



Judul : Transisi kendaraan listrik, komisi XII: perbanyak jumlah SPKLU supercas
Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Transisi Kendaraan Listrik Komisi XII: Perbanyak Jumlah SPKLU Supercas

WAKIL Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi meminta percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi energi yang setiap tahun membebani anggaran negara. Sebab subsidi untuk sektor energi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai hampir Rp 120 triliun dan sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seperti solar dan pertalite.

Ia ingin kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan kebijakan jangka panjang yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi. "Salah satu opsinya adalah masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik," ujar Haryadi dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Menurut Haryadi, pengembangan infrastruktur kendaraan listrik saat ini menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di berbagai daerah. Kehadiran SPKLU mobile juga menjadi solusi atas kekhawatiran masyarakat terhadap keterbatasan titik pengisian daya.

"Percepatan pembangunan SPKLU perlu melibatkan pihak swasta dan tidak hanya bergantung pada PT PLN," kata politikus Gerindra ini.

Dengan itu, ia mengusulkan agar pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya diwajibkan menyediakan SPKLU. Hal ini dilakukan untuk mendorong minatnya. Senik (23/2/2026) ke

kendaraan listrik.

"Awalnya harus dipancing dulu. Masyarakat selalu bertanya, ngisi di mana? Kalau infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh," kata dia dengan yakin.

Haryadi meyakini, kendaraan listrik jauh lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak dari sisi biaya operasional. Berdasarkan diskusi dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik disebut hanya sekitar Rp 1.600 per kilometer, lebih murah dibandingkan BBM.

Apalagi, lanjutnya, tren penurunan harga kendaraan listrik kini semakin terjangkau. Jika sebelumnya harga mobil listrik berada di atas Rp 1 miliar, kini sudah tersedia model dengan harga Rp 400 juta hingga Rp 200 juta-an.

"Ketika harga mulai turun dan infrastrukturnya tersedia, masyarakat akan beralih. Ini akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dan pada akhirnya mengurangi beban APBN," kata Harvadi.

Komisi XII DPR akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk skema pajak dan dukungan fiskal lainnya. Sebab transisi energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem berkelanjutan.

Yang paling penting, kata dia, negara tidak terus-menerus memposisikan APBN untuk memberikan subsidi atas konsumsi BBM. "Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan," tandasnya. ■ TIF